

IMPLEMENTASI KONSEP TRI HITA KARANA DALAM KONSERVASI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Eko Setiawan¹

¹ Sosiologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

E-mail: oke.setia@gmail.com

Abstract— This study describes the lives of the people around alas purwo national park buffer village that has local wisdom. Man with his intelligence can create an order in relation to God, fellow human beings, as well as relationships with nature. The most basic and urgent value in reconstructing local wisdom is the correlation of Tri Hita Karana implementation with conservation rules. The type of research used is descriptive qualitative with case study design. The results showed that the community around Alas Purwo National Park area has local wisdom in the form of a number of traditions, rules or restrictions that are still valid for generations which are then maintained and obeyed until now in managing forests to remain sustainable.

Keywords—: Tri Hita Karana; Conservation; Alas Purwo National Park; Local Wisdom.

I. PENDAHULUAN

Ajaran *Tri Hita Karana* merupakan konsep Ajaran Hindu, bahwa kebahagiaan hanya terwujud jika ada hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Manusia memiliki peranan dalam mewujudkan keharmonisan antara ketiga faktor tersebut (Wirawan, 2015). Konsep dari *Tri Hita Karana*, *parahyangan* (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*), *pawongan* (manusia), *palemahan* (alam tempat tinggal) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, keterpaduan ketiga unsur *Tri Hita Karana* harus diimplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Boleh dikatakan manusia hidup di alam dan untuk alam sehingga terjadi suatu kesatuan antara masyarakat tradisional dengan wilayah yang menjadi tempat tinggalnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat semua aktivitas manusia memiliki aturan, jika aturan ini tidak diikuti maka pasti akan terjadi kehancuran, dalam pergerakannya alam semesta memiliki aturan yang biasa disebut *Rta* (hukum alam). Tuhan menciptakan *Rta* (hukum alam) untuk kehidupan, jika salah satu bagian tidak mengikuti aturan maka akan terjadi kehancuran. Manusia sebagai makhluk paling sempurna yang ada di bumi memiliki peranan utama dalam menegakkan aturan. Manusia dengan kecerdasan yang dimilikinya dapat membuat aturan-aturan dalam berinteraksi sesama manusia, maupun alam sekitar. Aturan itu dapat bersifat universal dapat berlaku bagi semua manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan.

Dewasa ini banyak terjadi bencana alam, seperti tsunami, banjir, pemanasan global dan angin puting beliung. Jika ditelusuri lebih dalam, semua itu merupakan akibat ulah manusia yang tidak mengikuti aturan dalam mengelola alam. Salah satunya, hutan merupakan kekayaan alam yang wajib dijaga kelestariannya sebagai penyeimbang alam dan paru-paru bumi. Ekosistem hutan terdapat bermacam keanekaragaman hayati dan non hayati. Hutan merupakan kawasan potensial dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang hidup di area sekitar hutan. Masyarakat desa sekitar hutan atau yang disebut masyarakat tradisional tidak dapat dipisahkan karena merupakan bagian dari ekosistem hutan. Magdalena (2013) menyatakan, kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Hubungan hutan dan masyarakat setempat tidak lepas dari konsep ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 2014). Gauthama, et al (2013) menyebutkan bahwa masyarakat Jawa mengimplementasikan hakekat hubungan manusia dengan alam dengan falsafah *memayu hayuning bawana* (mengusahakan keselamatan dunia beserta segala isinya agar tetap harmonis). Persepsi masyarakat inilah yang dapat dijadikan penuntun moral dan pranata sosial dalam mengatur hubungan manusia dengan pemanfaatan sumberdaya alam hutan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Pada awalnya saling ketergantungan ini berjalan selaras, seiring perkembangan zaman disertai dengan pertambahan jumlah penduduk. Maka terjadi peningkatan kebutuhan pokok dan munculnya motivasi untuk meningkatkan pendapatan, maka eksploitasi terhadap sumberdaya hutan mulai dilakukan secara masif sehingga merusak keselarasan tersebut. Salah satunya adalah gangguan dari masyarakat sekitar desa penyangga kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Apabila tidak diantisipasi akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya hutan dan akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Berbagai gangguan tersebut pada dasarnya dapat dimaklumi mengingat sejak awal masyarakat sangat tergantung kepada sumberdaya

hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gangguan dan ancaman itu berupa pengambilan sumberdaya alam hayati dan non hayati di dalam kawasan. Hingga saat ini kondisi tersebut masih melekat di sebagian masyarakat sekitar desa penyangga meskipun kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai taman nasional. Apalagi sebagian masyarakat masih mempunyai persepsi bahwa hutan merupakan milik nenek moyang mereka.

Kondisi pengelolaan dan pengawasan kawasan saat itu memang buruk, hal tersebut tidak menghalangi orang-orang luar untuk terus mendesak masuk kedalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Banyak para pemburu liar sering keluar masuk hutan untuk berburu banteng, burung dan satwa lain yang bisa dijual. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir beberapa jenis binatang semakin berkurang dan sulit ditemukan seperti banteng dan burung cucak hijau. Ancaman perburuan terhadap satwa liar seringkali lebih besar dibandingkan dengan ancaman akibat hilangnya habitat (Bennet, 1997). Perburuan satwa liar di Taman Nasional Alas Purwo, terutama perburuan terhadap satwa yang dilindungi dan langka khususnya burung masih berlangsung hingga saat ini. Salah satunya burung cucak hijau (*Chloropsis sonnerati*), memiliki ciri dengan postur tubuh yang lebih besar serta memiliki kualitas kicauan yang tidak perlu diragukan lagi (Setiawan, Sukesu, Hidayat, & Yulianti, 2021). Kelebihan ini sangat terlihat terutama pada mentalnya yang pemberani, gaya bertarung dan suaranya yang gacor. Padahal secara ekologis peranan burung dapat dilihat dari pemanfaatan burung sebagai media *bio-monitoring* terhadap lingkungan (Furness and Greenwood, 1993). Burung dijadikan sebagai media kontrol terhadap terjadinya pencemaran atau perubahan lingkungan dengan cara melihat ada tidaknya habitat burung tadi di lokasi tertentu.

Dari uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa: agar terwujudnya keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam, maka harus memahami aturan dalam hubungan tersebut. Manusia dengan kecerdasan yang dimilikinya dapat menciptakan tatanan dalam hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan Tuhan, serta hubungan dengan alam. Nilai yang paling mendasar dan urgen dalam merekonstruksi kearifan lokal adalah korelasi implementasi *Tri Hita Karana* dengan kaidah konservasi.

Urgensi pengkajian partisipasi dalam kegiatan konservasi yang bersifat *top down* terbukti memberikan hasil tidak maksimal. Mendez-Lopez (2014) melakukan riset di Mexico juga mengakui bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi disebabkan banyaknya kondisi masyarakat yang belum lengkap diteliti. Senada temuan Thaman (2016), membuktikan partisipasi masyarakat pedesaan dalam kegiatan konservasi di Portugal hanya 43%, menjadikan konservasi tidak efektif. Berbeda di Fiji yang menggunakan pendekatan *bottom up* menunjukkan keterlibatan masyarakat yang besar 88% sehingga menjadikan kegiatan konservasi efektif. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan konservasi dapat dilihat di Costa Rica, ketika masyarakat berpartisipasi maka sektor swasta ikut terlibat (Aguilar-Stoen, 2015). Kondisi ini memberikan makna kegiatan yang menggunakan pendekatan partisipatif dan kebersamaan akan memberikan hasil yang baik.

Pentingnya pemahaman kearifan lokal pernah diungkapkan oleh Ihsannudin (2015b) bahwa kearifan lokal dalam konservasi sumberdaya alam yang dimiliki, sebagaimana *nyampa* di masyarakat Masalembu ternyata mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan konservasi sumberdaya alam. Tidak dapat dilupakan modal sosial harus dioptimalkan dalam pengelolaan sumberdaya alam (Ihsannudin, 2015a). Sebagai jawabannya, Liberati (2016) mengusulkan adanya *partnership* berupa partisipasi ragam pemangku kepentingan. Sudah banyak penelitian-penelitian yang mengintegrasikan kearifan lokal dan konservasi dengan fokus penelitian yang berbeda, diantaranya: fokus pada zonasi (Freitas & Tagliani 2009, Kosmaryandi, 2012), sedangkan perbedaan, metode dan proses integrasi taman nasional (Bohensky & Maru, 2011), pengetahuan tradisional ekologi mengenai populasi spesies (Fraser *et al.* 2006; Gagnon & Berteaux 2009; Moller *et al.* 2004). Klasifikasi vegetasi dan lingkungan (Naidoo & Hill 2006). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, serta dukungan pada pengelola Taman Nasional Alas Purwo untuk melibatkan masyarakat tradisional sekitar desa penyangga dengan mengintegrasikan konsep *Tri Hita Karana* dalam konservasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai landasan filosofis untuk memahami realitas dimasyarakat, dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas ataupun frekuensi (Denzin&Lincoln, 2000). Data yang digunakan merupakan data kualitatif yang tidak terdiri dari angka-angka, melainkan berupa gambaran dan data (Rahmad, 2010). Selain itu metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas dalam interaksi manusia (Sarwono, 2006). Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya serta berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami mereka tentang dunia sekitarnya dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi yang diperlukan (Iskandar, 2009). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan objek sesuai apa adanya (Sukardi, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana kondisi Taman Nasional Alas Purwo berkaitan dengan perilaku masyarakat sekitar desa penyangga dalam mengelola lingkungan dengan berpedoman pada *Tri Hita Karana*. Peneliti hadir sebagai instrumen kunci di mana peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode *Focus Group Discussion*, sebagai metode terakhir untuk mengumpulkan data lewat diskusi terpusat dengan mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat yang mengerti konsep *Tri Hita Karana*. Diskusi dilakukan secara intens untuk mendapatkan hasil pemaknaan yang lebih objektif, terkait perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan begitu, harmonisasi komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal (Neuman, 2003). Analisis data

menggunakan model interaktif, meliputi komponen-komponen, pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Konsep Parhyangan (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Tuhan)

Konsep kosmologi *Tri Hita Karana*, merupakan falsafah hidup yang memiliki konsep dalam melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah globalisasi. Pada intinya hakekat ajaran *Tri Hita Karana* menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini (Wiana, 2007). Prinsip pelaksanaannya harus sejalan, seimbang, selaras antara satu dan lainnya untuk mewujudkan kebahagiaan hidup (Gunung, 2004). Budiasni (2015) menambahkan ajaran *Tri Hita Karana* berasal dari Pustaka Suci Hindu yang dikenal dengan nama *Bhagawad Gita*. Konsep *Tri Hita Karana* mengandung nilai-nilai universal yang mengekspresikan pola-pola hubungan seimbang dan harmonis. Pada sisi lain Windia (2015) menyatakan *Tri Hita Karana* merupakan sikap hidup yang seimbang dan harmoni antara Tuhan, manusia, dan menyayangi alam berdasarkan *yadnya* (persembahan suci). Jadi, yang sangat membutuhkan ajaran *Tri Hita Karana* ini adalah manusia karena keharmonisan dengan tiga dimensi ini sebagai intisari *Veda*, yaitu *Satyam* dan *Sivam* yang kekal abadi atau kesucian tertinggi. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab kebahagiaan yang utuh di dalam kehidupan manusia (Hutasoit & Wau, 2017).

Konsep yang diambil dari tradisi mereka dan berhasil dalam menyelaraskan pengembangan budaya konservasi (Pitana, 2012). Harmoni selaras hubungan antara manusia dengan alam untuk pembangunan ekologi budaya (Yang, 2011). Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran *Tri Hita Karana* adalah dasar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki apabila mampu melakukan hubungan yang harmonis berdasarkan *yadnya* (ritual) kepada Ida Sang Hyang Widhi dalam wujud bakti kepada sesama manusia dalam wujud pengabdian dan kepada alam lingkungan dalam wujud pelestarian alam dengan penuh kasih (Purana, 2016). Hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan diwujudkan dengan jalan memuja dan menyembah Tuhan.

Parhyangan berasal dari kata Hyang yang berarti Tuhan, atau hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja Sang Hyang Widhi. Agar manusia senantiasa merasakan ketenangan dan kenyamanan. Agama sebagai pedoman dalam pemujaan terhadap Tuhan, bukan hanya mengajarkan bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Pencipta tetapi juga mengajarkan manusia untuk selalu menjaga lingkungan tempat manusia dalam menjalani proses kehidupan. Parhyangan sebagai elemen pola pikir dapat digambarkan pada eksistensi Pura Giri Salaka yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Pura Luhur Giri Salaka merupakan salah satu bangunan situs candi bercorak Hindu Jawa dengan bentuk Pura. Pada awalnya Pura Giri Salaka ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat pada tahun 1976. Saat itu masyarakat sekitar melakukan perambasan terhadap sejumlah kawasan hutan Taman Nasional Alas Purwo untuk bercocok tanam. Tepat berdirinya Pura itulah masyarakat menemukan sebuah gundukan tanah yang terdapat bongkahan-bongkahan bata besar bertumpuk, seperti gapura kecil. Sampai saat ini masih diyakini tempat tersebut digunakan untuk bertapa Maha Sri Suci Hindu zaman dulu. Untuk menghormati para leluhur, masyarakat sekitar kawasan taman nasional melakukan ritual agama dan membangun Pura tambahan sekitar 65 m untuk pemujaan. Disamping masih digunakan sebagai tempat beribadah umat Hindu, di dalam kawasan Pura ini terdapat bangunan penginapan yang sering digunakan pengunjung wisata untuk menginap dan berekreasi di sekitar situs. Bangunan Pura Luhur Giri Salaka yang unik dan menarik, menjadi salah satu obyek daya tarik wisatawan yang berkunjung pada tempat ini.

Pura Giri Salaka ramai dikunjungi oleh umat Hindu untuk melakukan ritual sembahyang khususnya saat Upacara Pagerwesi. Biasanya diadakan setiap hari Rabu *Shinta Pasa Kliwon Sasek Ketiga* yang berulang setiap 210 hari atau 7 bulan sekali, dan kegiatan ritual lainnya yang sering dijadikan obyek dan daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pagerwesi berarti benteng perlindungan dari besi yang melambangkan kekuatan spritual manusia. Ritual acara sakral tersebut merupakan upacara penyelamatan ilmu pengetahuan atau penolakan terhadap ancaman raksasa bagi umat manusia yang diturunkan oleh para Dewa. Dalam upacara tersebut terdapat prosesi *palemahan* yaitu membuang sesaji ke tanah agar dimakan oleh Raksasa Betarakala, tidak ketinggalan terdapat acara *pawongan* penurunan ilmu dari para Dewa. Dan yang terakhir *khayangan*, merupakan upacara umat Hindu sebagai tanda ungkapan syukur kepada Dewa yang telah memberikan limpahan ilmu pengetahuan.

B. Implementasi Konsep Pawongan (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Sesama Manusia)

Pawongan berasal dari kata *wong*, dalam bahasa Jawa yang artinya orang. Pawongan berkaitan dengan orang maupun perorangan dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di desa. Pawongan adalah media untuk membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia, terkait dengan subsistem nilai dan pola pikir. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainnya, tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain dalam mempertahankan hidupnya. Masyarakat merupakan kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu adat istiadat tertentu yang berkesinambungan (Koentjaraningrat, 2015). Hal ini tertuang dalam konsep *Tri Hita Karana* yaitu *pawongan*, merupakan suatu hakekat bahwa sebagian pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi dengan sesama masyarakat.

Masyarakat lokal di daerah penyangga diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, salah satunya pengembangan daerah penyangga melalui patroli kawasan, penjagaan kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa. Ada beberapa aspek pengelolaan

Taman Nasional Alas Purwo yang melibatkan masyarakat, salah satunya program pembinaan daerah penyangga dan dilaksanakan di daerah penyangga. Tetapi juga dilakukan kegiatan kepada orang-orang di luar daerah penyangga yang peduli terhadap konservasi. Juga ada pengelolaan zona penyangga yang sangat penting terhadap sukses tujuan konservasi.

Relasi petugas Taman Nasional Alas Purwo dengan masyarakat dalam pengelolaan perlu dilibatkan, sebab masyarakat berpotensi sebagai pendukung upaya konservasi sekaligus ancaman terhadap upaya konservasi. Petugas Taman Nasional Alas Purwo mempunyai strategi dalam pendekatan kepada masyarakat sekitar, yaitu melalui kader konservasi. Kader konservasi merupakan kader yang dibentuk oleh Taman Nasional Alas Purwo melalui pendidikan bina cinta alam yang mempunyai peranan dalam keberlangsungan lingkungan. Kader konservasi adalah seseorang yang telah dididik sebagai penerus upaya konservasi sumberdaya alam yang memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi dan bersedia menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat. Kader konservasi berfungsi sebagai pelopor atau penggerak konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Serta berperan aktif dalam gerakan konservasi sumberdaya alam di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, kader konservasi diharapkan mampu berperan aktif dalam menggerakkan upaya konservasi sumberdaya alam di tengah masyarakat. Kader konservasi mempunyai hak untuk mendapatkan kemudahan memasuki dan memanfaatkan kawasan konservasi, membina kader konservasi, dan mengikuti kegiatan-kegiatan konservasi alam.

Cara yang telah dilakukan oleh petugas taman nasional patut diapresiasi karena telah membangun kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan melalui kader konservasi. Sehingga bentuk-bentuk kerusakan lingkungan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, hal tersebut merupakan cerminan kualitas kesadaran yang baik dalam menjaga kelestarian hutan. Seperti kita ketahui bersama, kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah tugas dan tanggungjawab setiap warga negara. Kesediaan masyarakat menjadi kader konservasi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dibidang konservasi. Kader konservasi diharapkan mampu berperan dalam memberikan motivasi dan menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, kader konservasi diharapkan mampu berperan aktif dalam menggerakkan upaya-upaya konservasi sumberdaya alam di tengah-tengah masyarakat. Untuk dapat meningkatkan peran, tentunya kader konservasi juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Salah satu wujud usaha peningkatan kapasitas kader sendiri adalah pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tentang Pedoman Pembinaan Kader Konservasi No 11/kpts/DJ-VII/95 dan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK 41/IV-Set/HO/2006 tentang pedoman pembentukan kader konservasi, Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagai salah satu pengelola kawasan konservasi memiliki tanggungjawab dalam membina kader konservasi. Untuk itu kegiatan pembinaan kader konservasi telah menjadi agenda tahunan bagi Balai Taman Nasional Alas Purwo. Maksud dilaksanakannya kegiatan bina kader konservasi, Balai Taman Nasional Alas Purwo adalah meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia para anggota kader konservasi. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian kader konservasi terhadap pengelolaan ekowisata Balai Taman Nasional Alas Purwo. Sasaran dari kegiatan bina kader konservasi adalah seluruh kader konservasi Taman Nasional Alas Purwo, yang berasal dari sekitar desa penyangga Balai Taman Nasional Alas Purwo.

C. Implementasi Konsep Palemahan (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Lingkungan alamnya)

Istilah palemahan berasal dari kata lemah dalam bahasa Jawa yang artinya tanah. Palemahan juga berarti *bhuwana* yang berarti wilayah suatu pemukiman atau tempat tinggal. Tentang bagaimana manusia harus berperilaku dalam kaitannya dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan (Keraf, 2002). Mayoritas masyarakat lokal sekitar kawasan taman nasional, khususnya masyarakat lokal mempunyai tradisi turun-temurun dalam mengelola hutan. Masyarakat sekitar hutan mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengelola hutan agar hutan tetap lestari, di pihak lain sebagian masyarakat belum menyadari betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup mereka di masa depan. Hal yang lazim dilakukan adalah dengan eksploitasi sumberdaya hutan secara terus menerus.

Cara pandang masyarakat lokal terhadap alam, memiliki rasa empati dengan perilaku yang bertanggungjawab, disertai menghormati alam dengan cara meningkatkan etika lingkungan. Alam mempunyai hak untuk dihormati, bukan hanya karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi juga karena kenyataan ontologis bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam. Prinsip menghormati alam merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral manusia terhadap alam, bukan saja secara individu melainkan juga secara kolektif dalam masyarakat. Hal ini bisa dihayati sebagai etika lingkungan alam, erat kaitannya dengan cara bersikap terhadap lingkungan sekitar. Etika lingkungan sebagai refleksi tentang apa yang harus dilakukan terhadap isu lingkungan. Konteks masyarakat lokal sekitar Taman Nasional Alas Purwo, etika lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan alam sudah ada pada sistem budaya lokal, disertai dengan berbagai kepercayaan serta mitos yang dimaknai sebagai bagian dari penghormatan manusia terhadap alam. Dapat juga dimaknai sebagai bentuk pelestarian lingkungan, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat lokal memiliki aturan dan larangan-larangan dalam bentuk pantangan dan mitos yang diterima dan dihayati oleh masyarakat penganutnya sebagai bagian dari kearifan lokal.

Keberadaan kearifan lokal merupakan sesuatu yang penting dan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan secara kolektif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Taman Nasional Alas Purwo. Terkait dengan hal tersebut, kearifan lokal dengan sistem pelestarian hutan sebagai bagian dari lingkungan alam dapat disinergikan. Salah satu cara untuk mensinergikan adalah dengan mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat setempat dalam mengelola dan melestarikan lingkungan. Internalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan masyarakat

lokal, merupakan proses dialektika antara individu dalam kelompok masyarakat yang memiliki budaya yang sama dan dalam lingkungan yang sama. Dialektika tersebut diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan dengan tindakan mencegah kerusakan sejak dini melalui tindakan lokal sebagai perwujudan nilai-nilai atau norma-norma kearifan lokal yang ada pada masyarakat. Kearifan lokal dengan nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat sekitar kawasan taman nasional menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengelola lingkungan, sehingga kesinambungan dan keselarasan hidup dengan alam akan tetap terjaga dengan baik. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dengan unsur-unsur spiritual, mitos, dan kepercayaannya, memiliki peran dalam konservasi dan melindungi hutan serta sumberdaya alam lainnya. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan alam, maka internalisasi kearifan lokal merupakan suatu proses yang harus dilakukan demi tercapainya nilai ekologis.

Kearifan lokal yang terus bertahan hingga saat ini tergantung pada proses pengajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, hal ini akan berpengaruh pada teguhnya norma dan aturan hukum dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam. Jika hal ini pudar karena pengaruh modernisasi saat ini maka kelestarian sumberdaya alam termasuk hutan akan terancam karena tidak adanya proses penjagaan. Salah satu kegagalan dalam konservasi ditandai oleh meningkatnya degradasi hutan. Penyebab adanya degradasi hutan karena hilangnya interaksi antara masyarakat tradisional yang memiliki budaya mengenai lingkungan yang spesifik dengan lingkungannya (Pei *et al.* 2009) dan pengelolaan lahan yang sesuai strategi konservasi (Msuya, 2009). Sebagai contoh merosotnya relasi antara masyarakat lokal dengan lingkungan juga bisa dilihat penurunan pengetahuan budaya lokal, terutama pada generasi muda. Penurunan pengetahuan budaya lokal menjadi indikator degradasi hutan karena adanya penurunan pengetahuan mempengaruhi tata cara mengelola lahan secara berkelanjutan sehingga diperlukan sebuah penelitian yang mendokumentasikan kearifan lokal tersebut untuk dapat diintegrasikan dalam konservasi.

IV. KESIMPULAN

Taman Nasional Alas Purwo berpotensi sebagai penyangga kehidupan dikarenakan dalam pengelolaannya masih menerapkan kearifan lokal. Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo memiliki kearifan lokal, berupa implementasi ajaran *Tri Hita Karana* yang masih berlaku secara turun temurun yang kemudian dipelihara dan ditaati sampai saat ini. *Tri Hita Karana* sebuah konsep spiritual, kearifan lokal, dan sekaligus falsafah hidup masyarakat yang bertujuan untuk membentuk keselarasan hidup manusia. Konsep ini menggambarkan keseimbangan dan keselarasan hidup akan tercapai jika manusia menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan atau alam.

a. *Parhyangan* (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Tuhan)

Hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan diwujudkan dengan jalan memuja dan menyembah Tuhan. *Parhyangan* sebagai elemen pola pikir dapat digambarkan pada eksistensi Pura Giri Salaka yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Bentuk pelaksanaan implementasi konsep *parhyangan* ini denagn melaksanakan ajaran agama, melaksanakan kegiatan upacara keagamaan, serta ritual sembahyang khususnya saat upacara *pagerwesi*.

b. *Pawongan* (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Sesama Manusia)

Merupakan suatu hakekat bahwa sebagian pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi dengan sesama masyarakat. Masyarakat lokal di daerah penyangga diposisikan sebagai pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan. Ada beberapa aspek pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo yang melibatkan masyarakat, salah satunya program pembinaan daerah penyangga melalui kader konservasi.

c. *Palemahan* (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Lingkungan alamnya)

Manusia dalam berperilaku dalam kaitannya dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan alam, maka internalisasi kearifan lokal merupakan suatu proses yang harus dilakukan demi tercapainya nilai ekologis. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dengan unsur spiritual, mitos, dan kepercayaannya, memiliki peran dalam konservasi dan melindungi hutan serta sumberdaya alam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar-Stoen, Mariel. (2015). Global forest conservations initiatives as spaces for participation in Colombia and Costa Rica. *Journal Geoforum* 61 (2015) 36-44.
- Aminudin. (2013). *Menjaga Lingkungan dengan Kearifan Lokal*. Bandung: Titian Ilmu.
- Ashrama. (2006). *Implementasi Konsep Tri Hita Karana*. Denpasar: Green Paradise.
- Ayatrohaedi. (2016). *Kepribadian Budaya Bangsa*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Benneett, E. L., A.J. Nyaoi. (1997). Hornbills *Buceros* spp and Culture in Northern Borneo: Can they continue to coexist? *Biological Conservation* 82: 41-46.
- Bohensky EL, Maru Y. (2011). Indigenous Knowledge, Science, and Resilience: What Have We Learned from a Decade of International Literature on Integration?. *Ecology and Society*. 16(4): 1-7.
- Budiasni, Ni Wayan Novi. (2015). Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan*
- Denzin, NK and YS Lincoln (eds). (2000). *Handbook of Qualitatif Research (Second Edition)*, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication.
- Fraser DJ, Coon T, Prince MR, Dion R, Bernatchez L. (2006). Integrating Traditional and Evolutionary Knowledge in Biodiversity Conservation: a Population Level Case Study. *Journal Ecology and Society*. 11(2):1-7.
- Freitas DMD, Tagliani PRA. (2009). The Use of GIS for The Integration of Traditional and Scientific Knowledge in a Supporting Artisanal Fisheries Management in Southern Brazil. *Journal of Enviromental Management*. 90(6):2071-2078.
- Furness, R.W and J.D Greenwood (ed). (1993). *Bird as Monitors of Enviromental Change*. Chapman & Hall. London.
- Gauthama, M.P, Kusrestuwardhani, Alkadri. (2013). *Budaya Jawa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: BPPT Press.
- Gagnon CA, Berteaux D. (2009). Integrating Traditional Ecological Knowledge and Ecological Science: a Question of Scale. *Journal Ecology and Society*. 14(2):1-8.
- Gunung, M. G. Ida Pedanda. (2004). Sambutan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali. Seminar Tumbuhan Upacara Agama Hindu, UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali-LIPI.
- Hutasoit, H., & Wau, R. (2017). Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali). *Business Management Journal*, 13(2), 151–168. <https://doi.org/10.30813/bmj.v13i2.917>
- Ihsannudin. (2015a). The Role of Social Capital on Salt Smallholder Society of Madura Indonesia in Land Certification Ownership. *Scientific Journal of PPI-UK* 2(4): 144-151.
- Ihsannudin. (2015b). Fisherman’s Behavior of Multi Ethnic Community In Adapting Climate Change In Small Island. *International Journal of Andalas* 2(2): 1-14.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Keraf, S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Koentjaraningrat. (2015). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kosmaryandi N. (2012). *Pengembangan Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman hayati dan Kehidupan Masyarakat Adat [Disertasi]*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Liberati. (2016). Beyond Protection: Expanding Concervation Opportunity to Redefine Conservation Planning in the 21st Century. *Journal of Environmental Management*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.08.041>.
- Magdalena. (2013). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi*. Vol.10 No.2. doi.org/10.14710/jkt.v19i2.839.
- Mendez-Lopez. (2014). Local participation in biodiversity conservation initiatives: a comparative analysis of different models in South East Mexico. *Journal of Environmental Management* 125(1): 321-329.
- Moller H, Berkes F, Lyyer PO, Kislalioglu M. (2004). Combining Science and Traditional Ecological Knowledge: Monitoring Populations for Co-Management. *Journal Ecology and Society*. 9(3):1-10.
- Msuya, T.S. (2009). The Role of Traditional Management Practices in Enhancing Sustainable Use and Conservation of Medicinal Plants in West Usambara Mountains, Tanzania. *Tropical Conservation Science*. 2(1):88-105.
- Naidoo R, Hill K. (2006). Emergence of Indigenous Vegetation Classifications Through Integration of Traditional Ecological Knowledge and Remote Sensing Analyses. *Journal Enviromental Management*. 38(3):377-386.
- Neuman, William Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and quantitative Approaches*. Pearson Education.

- Nuridin, B. V., and Ng, K. S. F. (2013). Local Knowledge of Lampung People in Tulang Bawang: An Ethnoecological and Ethnotechnological Study for Utilization and Conservation of Rivers. *Procedia - Social Science and Behavioral*. 91: 113–119.
- Pei SJ, Zhang G, Huai H. (2009). Application of Traditional Knowledge in Forest Management: Ethnobotanical Indicator of Sustainable Forest Use. *Forest Ecology and Management*. 257: 2017–2027.
- Pitana, I. (2012). Tri Hita Karana -The Local Wisdom of the Balinese in Managing Development, 139–140. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-10829-7>
- Purana, I Made (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Umat Hindu. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, 67–76.
- Rahmat, Jalaluddin. (2010). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, E., Sukei, K., Hidayat, K., & Yuliati, Y. (2021). *Role of Forestry Police in Animal Protection in Alas Purwo*. 2(November 2020), 41–45. <https://doi.org/10.47857/irjms.2021.v02i01.040>.
- Soemarwoto, Otto. (2014). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sukardi. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thaman. (2016). A comparison of rural community perceptions and involvement in conservations between the Fiji Island and Southwestern Portugal. *Journal Ocean & Coastal Management* 133 (2016) 43-52.
- Wiana, I Ketut. (2007). *Tri Hita Karana Menurut Konsep*. Surabaya: Paramitha
- Wikantoyoso, Respati. (2019). Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota; Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota Berkelanjutan. Malang: Malang Grup Konservasi Arsitektur dan Kota.
- Windia, Wayan. (2015). Penerapan Tri Hita Karana Untuk Keberlanjutan Sistem Subak Yang Menjadi Warisan Budaya Dunia: Kasus Subak Wangaya Betan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis* Vol. 3, No. 1, Mei 2015.
- Wirawan, I Made. (2015). *Kajian Teologi, Sosiologi dan Ekologi Menurut Veda*. Surabaya: Paramitha.
- Yang, L. (2011). Research on cultural construction of city ecology. *Procedia Engineering*, 15, 5595–5597. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.1038>.